

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN ENOK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

Wage Taurusandika

wage.andika@gmail.com

Dinas Soaial Kabupaten Indragiri Hilir

Hadi Susanto

Sri Mulyani

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This research is to find out how the Policy Implementation of the Family Hope Program as well as the supporting and inhibiting factors in the Implementation of the Policy on the Family Hope Program in Enok District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. This type of research is a qualitative approach and focuses on whether or not the problem is easy to work on in the implementation of PKH, the ability of PKH policies to structure the implementation process properly, factors outside the policy that affect the PKH process. Informants in this study were PKH Implementers and PKH Beneficiary Families. Data was collected by using observation, interview and documentation methods. The results showed that the condition of PKH participants in Enok Subdistrict since the implementation of PKH in Enok Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, Riau Province experienced ease in accessing health and education facilities, another perceived benefit was as additional capital for their socio-economic life.

Keywords: *policy implementation, family program of hope*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan yang menjadi fokus penelitian pada mudah atau tidaknya masalah yang digarap dalam pelaksanaan PKH, kemampuan kebijakan PKH menstruktur proses implemtasinya secara tepat, faktor diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi PKH. Informan dalam penelitian ini adalah Pelaksana PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Peserta PKH di Kecamatan Enok sejak diimplementasikannya PKH di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mengalami kemudahan dalam akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, manfaat lain yang dirasakan yaitu sebagai modal tambahan bagi kehidupan sosial ekonomi mereka.

Kata kunci: implementasi kebijakan, program keluarga harapan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin, Subsidi BBM, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), serta Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk atau perwujudan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan dan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Program Keluarga Harapan pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan dikatakan sebagai program unggulan nomor satu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program Keluarga Harapan ini dijalankan sebagai pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial, Inpres No. 3 Tahun

2010 tentang Program Penanggulangan Pembangunan yang Berkeadilan dan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan uang kepada keluarga miskin berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Permensos tersebut.

Berangkat dari konsep implementasi kebijakan tersebut, sejauh ini pelaksanaan kegiatan PKH sudah berlangsung 7 tahun di Indonesia dan di Wilayah Kecamatan Enok sendiri sudah berjalan 4 tahun. Maka perlu untuk dilihat bagaimana implementasi PKH, perlu dikaji apa hambatan dan permasalahan dalam realisasi kebijakan PKH tersebut. Misalnya dari observasi awal dan wawancara dengan beberapa penerima PKH dan Pendamping pelaksana PKH, bahwa beberapa wilayah di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir desanya terletak jauh dari akses pendidikan dan kesehatan. Kemudian, meskipun akses tersebut sudah dijamin bebas biaya, Keluarga miskin tetap merasa kesulitan dalam memperoleh akses tersebut.

Pengimplementasian Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berjalan dengan optimal sehingga apa yang menjadi tujuan dari program ini dapat terwujud dalam pengentasan kemiskinan, untuk mengetahui penerapan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

TINJAUAN TEORETIS

Kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak (Mencher dalam Siagian, 2012:5). Salah satu konsekuensi logis dari upaya mengidentifikasi kemiskinan adalah bahwa kita akan menemukan dan membahas tentang jenis-jenis kemiskinan. Tidak mudah membahas dan mengemukakan jenis-jenis kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu bukan hanya harus dipandang dari kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok semata sebagai akibat kerentanan dan ketidakberdayaan seperti yang selama ini banyak dibicarakan dalam kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan juga harus dipandang dari pengertian kemiskinan relatif sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memberikan solusi yang merata pada akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya.

Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menetapkan 11 kriteria masyarakat / rumah tangga tergolong miskin yaitu : (1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (2) Mempunyai pengeluaran sebagian

besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana (3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah (4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga (5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester (7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah (8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah (9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran (10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang (11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, yang kemudian dideskripsikan secara terperinci tentang fakta-fakta dan data yang ada. Menurut Arikunto (2010:3) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah menganalisa implementasi program PKH yang diimplementasikan di Kecamatan

Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu: (a) Variabel mudah atau tidaknya masalah yang digarap dari PKH, artinya peneliti menganalisa program PKH dari tingkat kemudahan dan kesulitannya dalam implementasi kebijakannya. (b) Variabel kemampuan kebijakan PKH menstruktur proses implementasinya secara tepat. (c) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi.

Penelitian ini dilaksanakan Di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi daerah tersebut yang memiliki 1.286 Keluarga Penerima Manfaat pada bantuan Program Keluarga Harapan. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dilokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari sumber pertama berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi dilokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan data mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang telah ada pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kecamatan Enok. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administrasi, Kecamatan Enok terbagi menjadi 14 Desa dan Kelurahan yaitu; Kelurahan Enok yang merupakan ibu kota kecamatan, Kelurahan Pantai Seberang Makmur, Kelurahan Teluk Medan, Kelurahan Pusaran, Desa Simpang Tiga, Desa Simpang Tiga Daratan, Desa Sungai Lokan, Desa Rantau Panjang, Desa Sungai Ambat, Desa Pengalihan, Desa Jaya Bhakti, Desa Sungai Rukam, Desa Suhada dan Desa Bagan Jaya. Penduduk Kecamatan Enok terhitung hingga Tahun 2018 berjumlah 35.274 jiwa. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Desa yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Enok yaitu 5.306 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kelurahan Teluk Medan yaitu 674 jiwa.

Tabel 1

Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Enok Tahun 2017 dan Tahun 2018

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Rumah Tangga (KK)	
		2017	2018	2017	2018
1.	Bagan Jaya	4.405	4.460	1.230	1.246
2.	Suhada	3.080	3.114	833	844
3.	Sungai Rukam	3.737	3.780	949	961
4.	Pengalihan	2.843	2.876	780	791
5.	Sungai Ambat	1.675	1.695	441	447
6.	Rantau Panjang	1.986	2.008	512	519
7.	Simpang Tiga	1.122	1.135	267	270
8.	Jaya Bhakti	2.520	2.549	646	654
9.	Sungai Lokan	1.076	1.088	263	266

10.	Simpang Tiga Daratan	1.499	1.516	342	346
11.	Pusaran	3.341	3.379	829	839
12.	Enok	5.245	5.306	1.255	1.274
13.	Teluk Medan	666	674	234	237
14.	Pantai Seberang Makmur	1.675	1.694	470	476
Jumlah		34.870	35.274	9.051	9.170

Sumber : Kantor Camat Enok

Kecamatan Enok memiliki 78 sarana pendidikan yang tersebar di 14 desa/kelurahan, terdiri atas 44 sekolah negeri dan 34 sekolah swasta. Kecamatan Enok memiliki 2 Puskesmas Induk yaitu Puskesmas Enok yang terletak di Kelurahan Enok dan Puskesmas

Pengalihan Terletak di Desa Pengalihan, Selain itu juga terdapat beberapa sarana Kesehatan Lain seperti Pustu dan polindes yang tersebar di beberapa desa/ Kelurahan di Kecamatan Enok. Sarana Kesehatan ini merupakan sarana kesehatan andalan masyarakat Kecamatan Enok.

Tabel 2
Keluarga Miskin di Kecamatan Enok per Tahun 2018

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah (KK)
1.	Bagan Jaya	198
2.	Suhada	192
3.	Sungai Rukam	267
4.	Pengalihan	113
5.	Sungai Ambat	102
6.	Pusaran	114
7.	Enok	272
8.	Teluk Medan	56
9.	Rantau Panjang	172
10.	Simpang tiga	144
11.	Jaya Bhakti	132
12.	Sungai Lokan	87
13.	Pantai Seberang Makmur	132
14.	Simpang Tiga Daratan	80
Jumlah		2.061

Sumber : Kantor Camat Enok

Pelaksana PKH Kecamatan (PPKH) Kecamatan dibentuk disetiap kecamatan yang terdapat peserta PKH. PPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. Personil PPKH Kecamatan terdiri dari Pendamping PKH. Jumlah Pendamping disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di Kecamatan. Satu orang Pendamping mendampingi dengan rasio 200 hingga 300 Keluarga Miskin peserta PKH yang disesuaikan menurut kondisi daerah.

Untuk menentukan status

kepesertaan PKH di wilayah Kecamatan Enok, dilakukan proses pendataan ulang (*resertifikasi*) dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi. Hal ini untuk menentukan apakah keluarga penerima manfaat PKH masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Apabila hasil pendataan ulang menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat PKH mengalami peningkatan status sosial ekonomi dan/atau tidak lagi memiliki komponen kepesertaan PKH, maka keluarga penerima manfaat PKH tersebut akan keluar dari program (graduasi).

Namun, apabila hasil pendataan ulang menunjukkan bahwa peserta PKH belum mengalami peningkatan status sosial ekonomi dan masih memiliki komponen kepesertaan PKH, maka status kepesertaannya diperpanjang selama maksimal tiga tahun (transisi). Sedangkan tujuan pendataan ulang adalah menilai status sosial ekonomi peserta PKH,

mengidentifikasi program yang dimiliki peserta atau program lainnya, dan identifikasi keikutsertaan peserta PKH pada program perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada pendamping PKH, sampai saat ini di Kecamatan Enok belum ada keluarga penerima manfaat PKH yang digraduasikan.

Tabel 3
Pembagian wilayah dampingan PPKH Kecamatan Enok

No.	Nama	Jabatan	Desa/Kelurahan Dampingan	Jumlah KPM Dampingan
1.	M. Saibi, S. Sos	Koordinator Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Teluk Medan • Simpang Tiga Daratan • Sungai Lokan 	124
2.	Yuke Citra Wulandari, Amd. Kep	Pendamping 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pantai Seberang Makmur • Jaya Bhakti 	155
3.	Wage Taurusandika, SP	Pendamping 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pusaran • Sungai Ambat • Pengalihan 	205
4.	Iis Sholihat, SE	Pendamping 3	<ul style="list-style-type: none"> • Enok • Simpang Tiga 	225
5.	Leni Rosaria, S. Pd.I	Pendamping 4	<ul style="list-style-type: none"> • Suhada • Sungai Rukam 	319
6.	M. Afwan, S.HI	Pendamping 5	<ul style="list-style-type: none"> • Rantau panjang • Bagan Jaya 	258
Jumlah				1.286

Sumber : PPKH Kecamatan Enok

Keluarga Penerima Manfaat PKH/Peserta PKH di Kecamatan Enok

Sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018, di Kecamatan Enok yang berjumlah 14 Desa dan Kelurahan, seluruhnya mendapatkan bantuan PKH. Desa Sungai Rukam merupakan desa terbanyak yang mendapatkan bantuan PKH dengan jumlah 189 Keluarga. Sedangkan yang paling sedikit mendapatkan bantuan PKH adalah Kelurahan Teluk Medan dengan jumlah 10 Keluarga. Berikut tabel jumlah penerima bantuan PKH per desa dan kelurahan di Kecamatan Enok.

Penetapan peserta PKH di Kecamatan Enok ditetapkan berdasarkan kriteria keluarga penerima manfaat PKH,

data keluarga penerima manfaat PKH yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial kemudian dilakukan validasi oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Enok, seperti yang tercantum pada Kebijakan Pelaksanaan PKH Tahun 2017 kriteria keluarga penerima manfaat PKH yaitu keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut : (a) Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang (b) Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat,

termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang (c) Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat di dalam keluarga keluarga penerima manfaat PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama kedisabilitasinya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015) (d) Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 60 tahun ke atas di dalam keluarga keluarga penerima manfaat PKH dengan kriteria.

Pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok sudah berjalan sejak tahun 2014 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu sebanyak 664 Keluarga, kemudian pada tahun 2017 mengalami penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu sebanyak 622 Keluarga. Tujuan dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok yaitu untuk menjalankan amanat sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI serta melaksanakan Permensos RI No. 1 Tahun 2018, diharapkan dengan pelaksanaan PKH dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Enok.

Sebagai sebuah program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil, anak, penyandang disabilitas berat dan lansia diatas usia 60 tahun di Kecamatan Enok untuk memanfaatkan berbagai fasilitas

layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia. Dalam implementasinya, PKH dilakukan melalui beberapa tahapan yang terus berkesinambungan sesuai pedoman umum pelaksanaan Program PKH tersebut yang diputuskan oleh Pemerintah. Tahapan dalam pelaksanaan PKH meliputi ; penetapan sasaran, validasi, pembayaran pertama, pemutakhiran data, verifikasi, pembayaran tahap selanjutnya, dan transformasi (resertifikasi, transisi dan graduasi)

Sosialisai Program Keluarga Harapan di Kecamatan Enok

Pedoman Umum Pelaksanaan PKH Tahun 2018 menyatakan bahwa sosialisasi dan komunikasi PKH dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta PKH, terutama di daerah PKH. Tersosialisasikannya PKH kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan PKH. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi PKH yang komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program PKH, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

Kondisi Keluarga Miskin di Kecamatan Enok sejak di implementasikannya PKH

Program pengentasan kemiskinan melalui PKH ini mengarah pada *outcome* atau hasil dari kegiatan pengentasan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan. *Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah perubahan pola pikir masyarakat Peserta PKH tentang akan pentingnya pendidikan dan

kesehatan yang nantinya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang terjadi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Enok sesuai konsep Implementasi yang merupakan proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.

Dalam pengimplementasian PKH di Kecamatan Enok yaitu untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat tidak mampu terhadap pemanfaatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sehingga diharapkan ketika dilaksanakannya PKH tersebut, keluarga miskin mampu meningkatkan jangkauan terhadap pelayanan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Sementara, untuk jangka pendek Program PKH di Kecamatan Enok dapat memberikan bantuan uang kepada peserta PKH yang diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga. Sedangkan untuk jangka panjang, melalui kewajiban yang dipersyaratkan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku serta kesinambungan terhadap perbaikan kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Sehingga pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan yang ada di Kecamatan Enok.

Setidaknya ada dua yang dilihat dari Program PKH dalam implementasinya, yaitu perubahan Kondisi Kesehatan dan Kondisi Pendidikan pada Peserta PKH. Perubahan yang dirasakan oleh Penerima PKH di Kecamatan Enok, belum bisa dilihat secara langsung oleh Pejabat Kecamatan Enok H. Sultan, S.Sos, Kasi Kesos Kecamatan Enok. Menurutnya sulit melihat perubahan, dikarenakan dirinya belum memahami betul program tersebut dalam realisasinya.

Faktor Penghambat Implementasi PKH di Kecamatan Enok

Faktor penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana termasuk dalam pelaksanaan PKH di Wilayah Kecamatan Enok, dan setiap

program mempunyai masalah masing-masing, sehingga penangananyapun biasanya dikembalikan kepada masing-masing aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses implementasi suatu program. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program PKH di Kecamatan Enok. *Pertama*, tidak adanya pendamping PKH yang *intens* atau secara berkala mendampingi peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup peserta PKH di Kecamatan Enok. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, menyebabkan dana PKH dibelanjakan diluar ketentuan yang dipersyaratkan dalam PKH. *Kedua*, jauhnya jarak tempat tinggal pendamping yang berada di luar Wilayah Kecamatan Enok, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping. *Ketiga*, sulitnya melakukan koordinasi sesama Peserta PKH yang dikoordinir dalam kelompok. Hal tersebut disebabkan tempat tinggal peserta dalam kelompok tersebut jaraknya berjauhan dan tidak memadainya jaringan telekomunikasi yang bisa menginformasikan jika ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada Peserta PKH dari Pendamping PKH. Sehingga informasi telalu lama sampai ke Peserta PKH, karena harus didatangi dengan *dor to dor* ke rumahnya masing-masing.

Faktor Pendukung Implementasi PKH di Kecamatan Enok

Dalam implementasi PKH di Kecamatan Enok, selain penghambat pelaksanaan PKH tentunya ada juga yang menjadi pendukung, sehingga program tersebut harus tetap berjalan dan dilaksanakan untuk dapat terealisasi dengan baik. Sesuai dengan tujuan umum dari PKH yaitu mengurangi angka dan memutus rantau kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang dalam hal peningkatan kesejahteraan di Kecamatan Enok. Berdasarkan fenomena yang diamati dari hasil wawancara kepada informan, terdapat faktor lain yang mendukung proses implementasi kebijakan program ini di Kecamatan Enok, yaitu adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan program keluarga harapan (PKH) guna membantu memutus rantai kemiskinan. Faktor berikutnya adalah adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program dan adanya jaminan memperoleh kesehatan dan pendidikan yang layak dari pemerintah melalui dinas sosial.

Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Pada tahapan ini peneliti menganalisa mudah atau tidaknya masalah yang dikendalikan dari pelaksanaan PKH. Artinya menganalisa bagaimanakan pelaksanaan PKH di Kecamatan Enok yang mencakup; 1) kesukaran teknis atau mudahnya persyaratan teknis, yang didalamnya termasuk kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja dalam mencapai tujuan PKH di Kecamatan Enok; 2) keberagaman perilaku yang diatur dalam PKH, baik perilaku penerima PKH maupun pejabat pelaksana PKH di Kecamatan Enok; 3) tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki, yaitu merubah pola hidup peserta PKH untuk menjadi lebih baik tingkat kesejahteraanya dalam hal kesehatan dan pendidikannya.

SIMPULAN

Implementasi PKH di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah: (1) Mengenai pengetahuan dan kegiatan sosialisasi PKH yang dilakukan oleh Petugas/pendamping PKH di Kecamatan Enok, hanya dilakukan antara penerima PKH dan Petugasnya saja.

Sementara, sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat luas tidak dilakukan dengan baik. (2) Proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH di Kecamatan Enok sudah dilakukan dengan prosedur dan ketentuan PKH. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH, tetapi belum mendapatkan. (3) Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping atau Petugas PKH tidak dilakukan dengan baik. Proses pendampingan tidak sepenuhnya dilakukan kunjungan ke rumah peserta PKH sebagai upaya memastikan perkembangan dari target tujuan PKH. (4) Proses pendistribusian dana PKH kepada penerima PKH, dilakukan oleh peserta PKH itu sendiri melalui lembaga bayar BRILink. Dana yang diterima oleh Peserta PKH kerap digunakan untuk keperluan lain diluar ketentuan PKH, seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, dan digunakan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sudah rusak.

Bentuk program PKH di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah Program bidang kesehatan, jenis program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu program lainnya yaitu program PKH bidang pendidikan diberlakukan pada peserta PKH yang memiliki 7- 21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan.

Kondisi Peserta PKH di Kecamatan Enok sejak diimplementasikannya PKH di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Secara perubahan yang dirasakan oleh Peserta PKH setelah mereka mendapatkan program tersebut terlihat sangat dirasakan manfaatnya, baik dari akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan. Meski demikian, untuk jangka panjang PKH dengan yang diharapkan belum terjadi perubahan signifikan terutama

pada pola pikir dan perilaku serta kesinambungan terhadap perbaikan kehidupan peserta PKH. Sehingga upaya pemerintah melalui PKH yang bisa memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Enok belum bisa dilihat dengan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Depok: Lembaga Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adi, Isbandi Rukmianto. 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: UI-Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Edisi Kedua. Cetakan 4. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Wahab. Solihin. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta Bandung.
- Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. 2018. *Daftar Pendamping Sosial dan Keluarga Penerima Manfaat PKH*. UPPKH Kecamatan Enok.
- Edward III. George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly, Inc.
- Kantor Camat Enok. 2018. *Profil Kecamatan Enok*.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung; Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nazara, Suahasil dan Sri Kusumastuti Rahayu. 2013. *Program Keluarga Harapan (PKH); Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia*, International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG), United Nations Development Programme, dan Pemerintah Brazil. dari <http://www.ipc-undp.org/pub/bah/IPCPolicyResearchBrief42.pdf>, pada 25 Desember 2015.
- Pasolong. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Riyadi. Slamet. 2016. *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (Ksm) Penerima Bantuan (Studi Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sahib, Munawarrah. 2016. *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Jurnal Fakultas Ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin. Makassar.
- Suharto, Edi, Ph.D. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditma.
- Siagian, Matias. 2012. *Kemiskinan dan Solusi*. Medan: PT. Grasindo Monoratama.
- Winarno. 2002. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.
- Yosa Saputra. 2014. *Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pekanbaru.

